

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Dalam bab ini akan dibahas mengenai simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Simpulan tersebut merupakan intisari dari Bab IV berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diajukan pada Bab I. Rumusan masalah yang diajukan yaitu “bagaimana perkembangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari masa revolusi hingga periode Demokrasi Terpimpin tahun 1946-1961 ?” Maka dengan demikian, peneliti pun menurunkannya menjadi empat pertanyaan penelitian yaitu *pertama*, “apa yang melatarbelakangi Pemerintah Indonesia harus membentuk organisasi kepolisian?” *Kedua*, “bagaimana peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam perang kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945-1949?” *Ketiga*, “bagaimana peranan Kepolisian Republik Indonesia pada masa sistem demokrasi liberal pada tahun 1950-1955?” *Keempat*, “bagaimana peranan Kepolisian Republik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin pada tahun 1955-1961?”

Pembentukan kepolisian di Indonesia dilatarbelakangi oleh adanya keprihatinan pemerintah Indonesia atas situasi dan kondisi pada masa revolusi Indonesia. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam euforia kemerdekaan sehingga kekuatan-kekuatan sosial, politik dan ekonomi yang dianggap sebagai kaki tangan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dan Pemerintahan Militer Jepang dijadikan sasaran penyerangan oleh masyarakat. Penyerangan tersebut tentu menyebabkan huru-hara dan distabilitas keamanan dalam negeri, sehingga dengan demikian diperlukan kekuatan-kekuatan yang mampu memulihkan keamanan dan ketertiban tersebut. Maka oleh karena itu, pemerintah pun membentuk organisasi kepolisian dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri.

Kepolisian pada masa revolusi ditandai dengan adanya perubahan di dalam struktur organisasi kepolisian. Kepolisian yang pada awalnya tergabung di dalam struktur Departemen Dalam Negeri, telah dikeluarkan dari departemen tersebut dan langsung di bawah pimpinan Perdana Menteri. Kebijakan tersebut membawa

keuntungan bagi organisasi kepolisian, dimana mereka dapat menata organisasinya secara mandiri dan membentuk kesatuan-kesatuan yang dapat mendukung jalannya organisasi tersebut. Kesatuan-kesatuan tersebut adalah Pengawas Aliran Masyarakat (PAM), Mobil Brigade (Mobrig) dan lain sebagainya. Peranan Kepolisian dalam perang kemerdekaan dapat dilihat dari adanya keterlibatan Mobrig dalam mempertahankan kemerdekaan dari acaman Sekutu dan Belanda. Kepolisian melalui kesatuan teknisnya bekerjasama dengan Tentara Keamanan Rakyat (TKR), laskar-laskar dan masyarakat untuk bertempur di medan perang dalam mempertahankan kemerdekaan dari acaman Sekutu dan Belanda.

Memasuki periode Republik Indonesia Serikat (RIS), kepolisian terbagi menjadi dua bagian yakni kepolisian RIS dan Kepolisian Negara Bagian. Hubungan antara kepolisian RIS dengan kepolisian negara-negara bagian mengalami pasang surut. Pasang surutnya hubungan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan mengenai masalah kepolisian. Menanggulangi hal tersebut maka pemerintah membentuk Komisi Kepolisian yang tugasnya yaitu mengatur pekerjaan kepolisian RIS dengan kepolisian negara bagian. Peranan kepolisian pada masa RIS dapat dilihat dari adanya upaya tindakan cepat untuk mengatasi berbagai macam gangguan keamanan serta memperkuat hubungan antar anggota agar menciptakan sinerginitas di dalam tubuh korps bhayangkara.

Kepolisian pada masa Demokrasi Liberal ditandai dengan adanya kepolisian yang bersifat nasional. Pada masa ini, kepolisian negara-negara bagian dilebur menjadi satu yaitu Kepolisian Indonesia. Pembentukan kepolisian secara terpusat tersebut harus berlandaskan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara yang dianut. Dengan adanya pembentukan kepolisian yang bersifat nasional, maka cakupan kerja kepolisian meliputi seluruh wilayah Indonesia kecuali Irian Barat yang masih dalam pembincaraan antara Indonesia dengan Belanda. Peranan Kepolisian dalam periode Demokrasi Liberal dapat dilihat dari adanya keterlibat dalam menumpas gerakan sparatis yang menyebabkan disintegrasi bangsa. Penumpasan-penumpasan besar seperti gerakan APRA, DI/TII Jawa Barat, DI/TII Sulawesi dan lain sebagainya. Melalui kesatuan tempurnya yakni

Mobil Brigade (Mobrig), kepolisian bersama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan masyarakat bersama-sama melakukan penumpasan terhadap gerakan-gerakan tersebut.

Memasuki masa Demokrasi Terpimpin, organisasi kepolisian banyak mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat dilihat dari adanya proses pengintegrasian antara kepolisian dengan kesatuan-kesatuan lainnya seperti Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU). Penggabungan tersebut dilakukan dalam satu wadah yakni Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Tujuan dari penggabungan tersebut adalah menciptakan sinergitas antar sesama angkatan perang serta membangun harmonisasi di dalam angkatan tersebut. Peranan kepolisian pada masa periode Demokrasi Terpimpin dapat dilihat dari adanya dukungan penuh kepolisian terhadap pemerintah. Dukungan tersebut dapat dilihat dari adanya konsep Manifesto Kepolisian dengan dasar pelaksanaan Dekrit Presiden 1959 dan pidato Presiden pada tanggal 17 Agustus 1959. Adapun maksud dari Manifesto Kepolisian tersebut adalah adanya kesadaran penuh korps bhayangkara untuk merealisasikan kembali ke UUD 1945.

5.2 Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat disampaikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam mata pelajaran sejarah kelas XI semester II kurikulum 2013, terdapat Kompetensi Dasar (KD) Nomor 3.11 yaitu mengalisis perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari acaman Sekutu dan Belanda. Berdasarkan kompetensi dasar di atas maka penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peserta didik, khususnya berkaitan dengan sejarah kepolisian di Indonesia. Selanjutnya melalui penelitian ini peserta didik diharapkan mampu mengetahui awal perkembangan sejarah kepolisian di Indonesia serta bagaimana peranan kepolisian dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), baik acaman yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri.

2. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas mengenai perkembangan kepolisian di Indonesia sehingga dengan demikian penelitian tersebut diharapkan dapat menambah khazanah sejarah kepolisian Indonesia. Hadirnya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga korps bhayangkara dapat mengetahui bagaimana sejarah dan kiprah dari organisasi tersebut.
3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya bagi mahasiswa Departemen Pendidikan Sejarah yang ingin melakukan penelitian sejenis. Masih banyak hal yang perlu dikaji mengenai sejarah kepolisian pada umumnya, atau mengenai kesatuan-kesatuan kepolisian pada khususnya. Minimnya kajian-kajian tersebut dapat dijadikan peluang untuk melakukan penelitian selanjutnya sehingga akan menghasilkan penelitian yang menarik untuk menambah pembedaharaan sejarah kepolisian Indonesia.